

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjabaran dan analisis yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang termuat dalam Bab I Penulisan ini, yaitu:

1. Hukum perlindungan anak di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 17/2016) mensyaratkan dalam pengangkatan anak, calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan calon anak angkat (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Lebih lanjut dijelaskan bahwa frasa “orang tua” dalam ketentuan tersebut terdiri atas seorang ayah dan ibu tidak hanya salah satunya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sedangkan calon orang tua angkat (COTA) yang berasal perkawinan beda agama hanya salah satunya yang memiliki peluang beragama sama dengan calon anak angkat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain bertentangan dengan syarat pengangkatan anak yang tertera dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama juga mengurangi bahkan menghilangkan hak dan kewajiban anak yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip perlindungan anak

yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun hukum perlindungan anak mengatur secara tegas tentang syarat pengangkatan anak, namun secara jelas juga disebutkan pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat, yang dimana hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

2. Hukum pengangkatan anak di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110/2009) yang merupakan peraturan pelaksana dari hukum perlindungan anak kembali mengatur tentang pengangkatan anak secara lebih rinci, termasuk tentang pengangkatan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan melalui penetapan pengadilan dapat dan tidak dapat dilakukan. Ada dua jawaban dalam satu rumusan masalah ini sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya. Pada syarat pengangkatan anak secara umum memang sudah ditegaskan bahwa calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan calon anak angkat (CAA). Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) terbagi menjadi dua yakni pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, pasangan perkawinan beda agama memiliki kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak. Kesempatan dapat tercipta apabila hukum adat yang mengatur tentang pengangkatan anak mengizinkan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat (COTA) yang berbeda agama. Selanjutnya untuk pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, pasangan perkawinan beda agama tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan

anak secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan. Keduanya memiliki persyaratan materil yang mengharuskan calon orang tua angkat (COTA) seagama dengan calon anak angkat (CAA), syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pasangan perkawinan beda agama, sehingga pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

5.2. Saran

Berdasarkan seluruh penjabaran dalam penulisan ini serta kesimpulan di atas maka berikut saran yang akan diberikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak seharusnya mengatur secara tegas tentang pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan ataupun pertanyaan bagi masyarakat awam yang akan melakukan pengangkatan anak.
2. Bagi pemerintah, untuk melakukan harmonisasi pengaturan pengangkatan anak, baik yang tercantum dalam ketentuan adat kebiasaan setempat maupun dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kesamaan prosedur dan tata cara pengangkatan anak di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit 2004.
- Alkitab (Kitab Suci Umat Kristen).
- Al Quran (Kitab Suci Umat Islam).
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Hukum Kanonik (Kitab Hukum Agama Katolik).
- Mahkamah Agung Indonesia. (2012). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Matakin. (2008). *Kitab Li Ji*. Jakarta: Pelita Kebajikan.
- Meliala, Djaja. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Simatupang, Nursariani. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radila Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sriwulan, Hermin. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wulayo, Bambang. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal & Surat Kabar

- Affan, Herder. (2022). Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama. Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish, diakses 24 Februari 2023, pukul 18.36 WIB.

- Aminah, Aminah. (2018). Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review, Vol. 3, No. 1, (2021)*. Tersedia di: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/3830/2147> diakses 18 November 2023 pukul 15.10 WIB.
- Ayu, Monica. 2022. Hukum Adat: Pengertian, Sumber dan Unsur. Tersedia di: https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat--pengertian-sumber-dan-unsur#google_vignette diakses 12 Desember 2023 pukul 14.12 WIB.
- Ayu, Nimas. 2023. Perang Dunia I disebabkan oleh Apa? Ini Sejarahnya. Tersedia di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6964871/perang-dunia-i-disebabkan-oleh-apa-ini-sejarahnya>, diakses 17 November 2023.
- Basuki, Agung. (2019). Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 1, (2019)*. Tersedia di: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5013/2640> diakses 18 November 2023 pukul 17.27 WIB.
- BBC com. 2011. Pengakuan Negara atas Kong Hu Cu. Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong diakses 15 Oktober 2023 pukul 16.50 WIB.
- CNN Indonesia. 2022. Seluk Beluk UNICEF: Sejarah, Tujuan, dan Program. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220522143209-140-800594/seluk-beluk-unicef-sejarah-tujuan-dan-program#:~:text=Sejak%20didirikan%20pada%201946%20hingga,membantu%20anak%20Danak%20yang%20rentan> diakses 31 Oktober 2023 pukul 01.48 WIB.
- Daeng, Anisah. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal JULIA, Vol 9, No. 4 (2022)*. Tersedia di: <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/109/88> diakses 11 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.
- Dasa, Dwi. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Islaman, Vol.7, No.02, (2021)*. Tersedia di:

- <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079/721>, diakses 18 Oktober 2023 pukul 16.27 WIB.
- Fahlevi, Reza. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, (2015). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> diakses Sabtu 2 Desember 2023 pukul 10.34 WIB.
- Halim, Abdul. (2016). Keabsahan perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, (2016). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/255600-keabsahan-perkawinan-beda-agama-diluar-n-fe1222b4> diakses 28 Oktober 2023 pukul 18.01 WIB.
- Harruma, Issha. 2022. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli?page=all> diakses 12 Desember 2023 pukul 14.08 WIB.
- Islamiyati, Islamiyati. (2010). Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri dalam Hukum Islam. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No.3, (2010). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/164746-ID-pencatatan-pernikahan-sebagai-upaya-pena.pdf> diakses 12 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB.
- Kompas com. 2022. Akibat Perang Dunia II. Tersedia di: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/170000969/akibat-perang-dunia-ii?page=all> diakses 31 Oktober 2023 pukul 01.06 WIB.
- Kompas com. 2022. Tripitaka: Sejarah dan Isinya. Tersedia di: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/08/090000579/tripitaka--sejarah-dan-isinya?page=all> diakses 14 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB.
- Kompas com. 2023. Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB. Tersedia di: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb?page=all> diakses 31 Oktober 2023 pukul 01.18 WIB.
- Lon, Yohanes. (2019). Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran akan Hukum Kanonik Gereja Keuskupan Ruteng Manggarai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No.1*, (2019). Tersedia di:

http://repository.unikastpaulus.ac.id/173/1/6.1._Meningkatkan_Pengetahuan_dan.pdf diakses 13 Oktober 2023 pukul 15.17 WIB.

Marlen, Jane. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum, Vol. 1, No.2, (2013)*. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710/1352>, diakses 23 Februari 2023 pukul 19.06 WIB.

Maryl, Agatha. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. *Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020)*. Tersedia di: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2391/1682>, diakses 28 Februari 2023 pukul 11.32 WIB.

Nasution, Adwiyah. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, Vol. 6 No. 1 (2019)*. Tersedia di: <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2473/2072> diakses 7 Maret 2023 pukul 19.05 WIB.

Nurcholish, Ahmad. (2014). Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia (HAM), Vol. 11, No.11 (2014)*. Tersedia di: <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/view/92/86> diakses 18 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB.

Patrisia, Gledys. (2015). Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex et Societatis, Vol.3, No.4, (2015)*. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/806> diakses 13 Oktober 2023 pukul 16.38 WIB.

Rahmawati, Ni Nyoman. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 9, No. 1, (2019)*. Tersedia di: <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belum-bahadat/article/view/341/PENGESAHAN%20PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20HINDU.pdf>, diakses 14 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

- Rais, Muhammad. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No.2, (2016). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/285476-kedudukan-anak-angkat-dalam-perspektif-h-b42e110b.pdf> diakses 18 November 2023 pukul 16.08 WIB.
- Safarianingsih. (2022). Akibat Hukum Pengangkatan Tanpa Penetapan Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.2, (2022). Tersedia di: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/684/684> diakses 28 Februari 2023 pukul 13.50 WIB.
- Septiani, Zefanya. 2023. Siapa yang Mulai Perang Dunia II? Ini Pemicunya. Tersedia di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6828026/siapa-yang-mulai-perang-dunia-ii-ini-pemicunya> diakses 17 November 2023 pukul 21.15 WIB.
- Subqi, Imam. (2016). Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1, No.2, (2016). Tersedia di: <https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/648/489> diakses 10 Desember 2023 pukul 19.44 WIB.
- Sumarsan, Thomas. 2022. Kebahagiaan Tertinggi Ya- Nibban. Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/gruppenulismettasik0279/6344937d35d20103bc56da62/kebahagiaan-tertinggi-ya-nibbana> diakses 14 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
- Wahyuni, Sri. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Sosial Kemasyarakatan I*, Vol.11, No.2, (2011). Tersedia di: <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257> diakses 14 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB.

Website & Internet

- Augustine, Valerie. 2022. Asas Hukum: Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posteriori Beserta Contohnya. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806> diakses 11 Desember 2023 pukul 08.59 WIB.

Badan Pembinaan Hukum, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses Jumat 27 Oktober 2023, pukul 17.06 WIB

Christiawan, Rio. 2020. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Tersedia di: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/302/pdf#:~:text=Penetapan%20adalah%20putusan%20yang%20berisi,dituangkan%20dalam%20bentuk%20ketetapan%20pengadilan>, diakses 2 April 2023, pukul 01.18 WIB.

Edwind, Normand. 2021. Jelas, Jelas Kawin Beda Agama di Indonesia Sah dengan Penetapan Pengadilan. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60892d53f3876/jelas--kawin-beda-agama-di-indonesia-sah-dengan-penetapan-pengadilan>, diakses 18 Oktober 2023 pukul 14.32 WIB.

Indonesia, go.id, <https://indonesia.go.id/profil/agama#:~:text=Agama%20Buddha%20merupakan%20Agama%20tertua,suci%20agama%20Buddha%20adalah%20Tripitaka>, diakses Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Jata, Tri. 2014. Usia Berapa Anak Berhak Memiliki Agama Sendiri. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/usia-berapa-anak-berhak-memilih-agama-sendiri-lt53abef0ca056c> diakses 17 November 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://jambi.kemenag.go.id/news/509152/pembimas-kristen-tekanan-alkitab-sebagai-pusat-pernikahan-kristen-dengan-didasari-kasih.html>, diakses Sabtu 14 Oktober 2023 Pukul 16.13 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/khonghucu/pengetahuan-dasar-agama-khonghucu-wssxlp> diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 16.43 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=Baqarah%3A%20221>) diakses Kamis 26 Oktober 2023 pukul 15.07 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, tersedia di: <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses Sabtu, 21 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> diakses Selasa, 31 Oktober 2023 pukul 02.08 WIB.

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-meng-enai-pernikahan-katolik> diakses Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 15.46 WIB.

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-meng-enai-pernikahan-katolik> diakses Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

Korina, Desi. 2018. Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tersedia di: <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BQ-DESI-KORINA-SANGGA-RITI-D1A014052.pdf>, diakses 2 April 2023, pukul 01.38 WIB.

Kurniawan, Adi. 2020. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt-5e3beae140382> diakses 30 Oktober 2023 pukul 23.49 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, diakses Kamis, 18 Oktober 2023 pukul 14.46 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401> diakses Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 12.54 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11155>, diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 16.56 WIB.

Munawaroh, Nafiatul. 2023. Kekuatan Hukum Politik MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, diakses 28 Oktober 2023 pukul 17.30 WIB.

- Pengadilan Agama Pasuruan,
<https://pa-pasuruan.go.id/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/>
diakses
Selasa, 31 Oktober 2023 pukul 00.02 WIB.
- Sandra, Erlina. 2010. Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tersedia di:
http://eprints.undip.ac.id/23782/1/ERLINE_SANDRA_KRISTANTI.pdf diakses 15 Oktober 2023 pukul 16. 51 WIB.
- Suryana, Suryana. 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Tersedia di:
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf, diakses 21 Februari 2023 pukul 10.35 WIB.
- Tobing, Letezia. 2014. Keabsahan Pengangkatan Anak secara Adat. Tersedia di:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-pengangkatan-anak-secara-adat-lt54622bbfeebc1> diakses 12 Desember 2023 pukul 15.21 WIB.
- Triani, Diah. 2010. Perkembangan Pengaturan Adopsi di Indonesia. Tersedia di:
<https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-T%2026919-Implementasi%20pengaturan-Literatur.pdf> diakses 18 November 2023 pukul 15.50 WIB.
- unicef Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
diakses Selasa, 31 Oktober 2023 pukul 02.05 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/2022.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VIII/MUI/8/2015.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Pemerintah R.I., No.54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 232.
- Peraturan Presiden R.I., No. 96 Tahun 2018, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 184.
- Peraturan Menteri Sosial R.I., No.110/HUK/2009, Persyaratan Pengangkatan Anak, L.N.R.I. Tahun 2009 No. x
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986.

Putusan Nomor 155/Pdt. P/ 2023/PN.Jkt.Pst.

Undang-Undang Dasar Negara R. I. 1945. Amandemen ke IV.

Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 01.

Undang-Undang R.I., No. 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 186.

Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2022 No.109.

Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297.

Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan, L.N.R.I. Tahun 2006 No. 124.

Undang-Undang R.I., No. 24 Tahun 2013, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 232.